

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TINGKAT
PENGANGGURAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU**

Mega Rahma Putri¹, Muhammad Ali Ridla², Nur Azise³

Universitas Ibrahimu Situbondo

E-mail: megarahma726@gmail.com¹, elridla@gmail.com²,
nurazizahdiamon@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Data sekunder yang digunakan adalah data Panel tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan - 0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci — Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (BPS. 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan (BPS. 2007).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh banyak factor terutama factor-faktor social ekonomi. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh BPS, Jakarta (2009) yang menggunakan data cross section menurut provinsi di Indonesia tahun 2008 diperoleh kesimpulan IPM di setiap provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh variable laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, rata-rata umur kawin pertama wanita, setengah pengangguran dengan jam kerja per-minggu < 15 jam, persentase desa yang telah menggunakan listrik dan persentase desa dengan jarak

SMP terdekat > 10 Km. Dari hasil kajian tersebut diketahui laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi disuatu provinsi, semakin tinggi pula IPM provinsi tersebut. Variable persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berpengaruh negative terhadap IPM. Hal ini berarti semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menyebabkan angka IPM semakin rendah. Rata-rata umur kawin pertama wanita mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti semakin tinggi rata-rata umur kawin pertama wanita disuatu provinsi, menyebabkan nilai IPM semakin tinggi. Variable setengah pengangguran dengan jam kerja perminggu < 15 jam berpengaruh negative terhadap nilai IPM.

Semakin tinggi penduduk berstatus setengah pengangguran, nilai IPM di provinsi tersebut semakin rendah. Variable persentase desa yang telah menggunakan listrik mempunyai pengaruh positif terhadap IPM disuatu provinsi. Hal ini berarti semakin tinggi persentase desa yang telah menggunakan listrik disuatu provinsi, semakin tinggi pula nilai IPM di provinsi tersebut. Variable persentase desa dengan jumlah SMP terdekat > 10 Km mempunyai pengaruh negative terhadap IPM. Hal ini berarti semakin tinggi persentase desa dengan jarak SMP terdekat > 10 Km semakin rendah nilai IPM di provinsi tersebut (BPS, 2009). Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda, 2011) oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Bappeda, 2011). Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM. Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industry yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda, 2010). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Bappeda, 2011). Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupate/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah telaah pustaka yang ditunjang

dengan analisis deskriptif kuantitatif terhadap data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data perkembangan IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data-data tersebut bersumber dari BPS, Jakarta, BPS Provinsi Riau dan Bappeda Provinsi Riau.

Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

x₁ = tingkat kemiskinan (%)

x₂ = tingkat pengangguran (%)

x₃ = upah minimum kabupaten/kota (Rp 000,)

x₄ = laju pertumbuhan ekonomi (%)

b₀ = konstanta

b_i = koefisien regresi masing-masing variable

i = 1, 2, 3 dan 4

e = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan nilai IPM Provinsi Riau pada periode 2006-2011 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006 nilai IPM Provinsi Riau 73,81 dan pada tahun 2011 bernilai 76,53. Pada tahun 2006 nilai IPM Kabupaten Kuantan Singingi 71,89 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 74,15. Nilai IPM di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2006 adalah 72,04 dan pada tahun 2011 menjadi 74,54. Nilai IPM Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2006 adalah 73,39 dan pada tahun 2011 menjadi 75,71. Nilai IPM Kabupaten Pelalawan pada tahun 2006 adalah 69,96 dan pada tahun 2011 sebesar 73,59. Nilai IPM Kabupaten Siak pada tahun 2006 sebesar 74,55 dan pada tahun 2011 menjadi 76,92. Nilai IPM Kabupaten Kampar pada tahun 2006 dan 2011 masing-masing sebesar 72,02 dan 75,18. Nilai IPM Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2006 dan 2011 masing-masing sebesar 71,01 dan 73,10. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2006 dan 2011 masing-masing sebesar 73,10 dan 75,53. Nilai IPM Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2006 dan 2011 masing-masing sebesar 70,89 dan 72,83. Nilai IPM Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 dan 2011 masing-masing sebesar 70,15 dan 71,08. Nilai IPM Kota Pekanbaru dan Kota Dumai pada tahun 2006 masing-masing sebesar 76,19 dan 75,52, pada tahun 2011 masing-masing sebesar 78,72 dan 78,25. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota 2006-2011

No	Kabupaten /Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuantan Singingi	71,89	72,47	72,95	73,38	73,70	74,15
2	Indragiri Hulu	72,04	72,96	73,43	73,89	74,18	74,54
3	Indragiri Hilir	73,39	73,87	74,41	74,95	75,24	75,71
4	Pelalawan	69,96	71,43	72,07	72,69	73,18	73,59
5	Siak	74,55	75,15	75,64	76,05	76,46	76,92
6	Kampar	72,02	72,98	73,64	74,14	74,43	75,18
7	Rokan Hulu	71,01	71,43	71,84	72,29	72,66	73,10
8	Bengkalis	73,10	73,36	74,12	74,64	75,11	75,53

9	Rokan Hilir	70,89	71,06	71,51	71,98	72,43	72,83
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	70,15	70,62	71,08
11	Pekanbaru	76,19	76,98	77,54	77,86	78,27	78,72
12	Dumai	75,52	76,31	76,91	77,33	77,75	78,25
	Riau	73,81	74,63	75,09	75,60	76,07	76,53

Sumber : BPS. Jakarta: Indonesia

Pada table tersebut dapat diketahui daerah tingkat II yang mempunyai nilai IPM diatas nilai IPM Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru, Dumai, dan kabupaten Siak. Nilai IPM yang dicapai oleh Provinsi Riau dan seluruh daerah tingkat II termasuk kategori menengah atas adalah capaian nilai $66 \leq \text{IPM} < 80$ (BPS, 2012).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Pada tabel 2 tersebut dapat diketahui tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama periode 2006-2011 menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan 11,85% dan turun pada tahun 2011 menjadi 8,17%. Menurut Anur Rofiq (2014) menurunnya tingkat kemiskinan disebabkan turunnya tingkat inflasi dan harga beras yang stabil. Factor inflasi dan stabilitas harga beras sangat membantu mengurangi jumlah rakyat miskin di pedesaan, karena penduduk desa hidupnya sangat tergantung pada makanan pokok beras.

Tabel 2. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau menurut daerah tingkat II tahun 2006-2011 (%)

No	Kabupaten /Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuantan Singingi	21,28	19,03	16,51	14,42	12,57	10,19
2	Indragiri Hulu	15,97	14,63	12,05	10,25	8,90	7,25
3	Indragiri Hilir	14,85	14,57	13,19	11,11	9,41	7,65
4	Pelalawan	19,80	18,07	18,63	16,71	14,51	11,93
5	Siak	5,45	6,01	7,09	5,71	6,49	5,29
6	Kampar	11,69	10,73	11,45	10,04	10,47	8,52
7	Rokan Hulu	23,81	21,86	18,05	15,49	13,03	10,66
8	Bengkalis	11,56	10,69	8,94	7,91	8,25	6,72
9	Rokan Hilir	9,09	9,41	10,59	9,32	9,30	7,58
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	42,57	34,53
11	Pekanbaru	2,16	2,24	3,63	3,92	4,20	3,42
12	Dumai	7,69	6,28	7,42	6,08	6,45	5,27
	Riau	11,85	11,20	10,79	9,45	8,65	8,17

Sumber : BPS Provinsi Riau

Daerah tingkat II yang paling rendah tingkat kemiskinan pada tahun 2006 adalah kota Pekanbaru (2,16%) dan yang tertinggi adalah kabupaten Rokan Hulu (23,81%). Daerah tingkat II yang mempunyai tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan provinsi Riau adalah kabupaten Kuantan Singingi (21,28%), Indragiri Hulu (15,79%), Indragiri Hilir (14,85%), Pelalawan (19,80%) dan Rokan Hulu (23,81%). Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di kabupaten Kepulauan Meranti (34,53%) dan terendah di kota Pekanbaru (3,42%). Daerah tingkat II yang mempunyai angka tingkat kemiskinan diatas tingkat kemiskinan provinsi Riau adalah kabupaten Kuantan Singingi (10,19%), Pelalawan (11,93%), Kampar (8,52%), dan Rokan Hulu (10,66%).

Perkembangan tingkat pengangguran di provinsi Riau dapat dilihat pada table 3 berikut ini :

Pada tabel 3 tersebut dapat diketahui tingkat pengangguran terbuka di provinsi Riau pada periode 2006-2011 relatif menurun. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran terbuka

10,24% dan pada tahun 2011 sebesar 5,32%. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran tertinggi di kota Pekanbaru (15,82%) dan terendah di kabupaten Siak (4,82%). Pada tahun 2011 tingkat pengangguran tertinggi di kota Pekanbaru (9,33%) dan terendah di kabupaten Pelalawan (2,93%). Daerah tingkat II yang mempunyai tingkat pengangguran diatas tingkat pengangguran provinsi Riau adalah kabupaten Bengkalis (6,09%), Kepulauan Meranti (5,52%), kota Pekanbaru (9,33%) dan Dumai (5,65%).

Tabel 3. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota tahun 2006-2011 (%)

No	Kabupaten	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuantan Singingi	4,49	7,61	4,96	6,76	4,86	2,95
2	Indragiri Hulu	5,22	4,79	3,91	7,18	8,28	4,14
3	Indragiri Hilir	7,32	6,37	4,57	3,88	5,41	4,80
4	Pelalawan	6,51	7,74	6,27	6,41	4,69	2,93
5	Siak	4,82	7,39	5,92	8,01	9,37	4,38
6	Kampar	6,12	6,65	6,08	7,71	9,23	4,89
7	Rokan Hulu	5,65	5,91	4,16	6,81	8,61	3,38
8	Bengkalis	7,51	11,82	11,77	13,21	11,36	6,09
9	Rokan Hilir	7,20	9,22	9,56	7,88	9,33	4,57
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	6,70	5,52
11	Pekanbaru	15,82	19,51	14,24	12,03	10,23	9,33
12	Dumai	8,64	18,54	14,90	13,45	14,68	5,65
	Riau	10,24	9,79	8,20	8,56	8,72	5,32

Sumber : BPS Provinsi Riau

Perkembangan upah minimum provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota tahun 2006-2011 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Perkembangan upah minimum di provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota tahun 2006-2011 (Rp 000)

No	Kabupaten	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuantan Singingi	637,00	710,00	800,00	912,24	1017,50	1123,00
2	Indragiri Hulu	669,00	760,00	900,00	1054,00	1108,50	1208,00
3	Indragiri Hilir	637,00	710,00	816,00	933,80	1040,00	1130,00
4	Pelalawan	637,00	745,00	848,00	930,00	1020,00	1128,00
5	Siak	637,00	710,00	838,00	938,00	1048,00	1186,00
6	Kampar	637,00	710,00	955,00	1020,00	1122,00	1234,00
7	Rokan Hulu	756,00	790,00	880,00	959,20	1060,00	1150,00
8	Bengkalis	637,00	710,00	800,00	945,00	1050,00	1123,00
9	Rokan Hilir	637,00	710,00	800,00	901,60	1040,00	1140,00
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	1016,00	1125,00
11	Pekanbaru	637,00	710,00	825,00	925,00	1055,00	1135,00
12	Dumai	785,65	812,65	915,60	967,50	1070,00	1177,00

13	Riau	637,00	710,00	800,00	901,60	1016,00	1120,00
----	------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau

Pada tabel 4 tersebut dapat dilihat upah minimum provinsi Riau periode 2006- 2011 setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2006 besarnya upah minimum provinsi Riau Rp 637000, meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp 1120000, rata- rata peningkatan upah minimum 11,95% per tahun. Upah minimum kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1123000, rata-rata peningkatan sebesar 12% per tahun. Upah minimum kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2006 sebesar Rp 669000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1208000, rata-rata peningkatan sebesar 12,54% per tahun. Upah minimum kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1130000, rata-rata peningkatan sebesar 12,15% per tahun. Upah minimum kabupaten Pelalawan pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1128000, rata-rata peningkatan sebesar 12,11% per tahun. Upah minimum kabupaten Siak pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1186000, rata-rata peningkatan sebesar 13,24% per tahun. Upah minimum kabupaten Kampar pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1234000, rata-rata peningkatan sebesar 14,14% per tahun. Upah minimum kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2006 sebesar Rp 756000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1150000, rata-rata peningkatan sebesar 8,75% per tahun. Upah minimum kabupaten Bengkalis pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1123000, rata-rata peningkatan sebesar 12% per tahun. Upah minimum kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1140000, rata-rata peningkatan sebesar 12,34% per tahun. Upah minimum kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010 sebesar Rp 1016000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1125000, rata-rata peningkatan sebesar 10,73% per tahun. Upah minimum kota Pekanbaru pada tahun 2006 sebesar Rp 637000, pada tahun 2011 sebesar Rp 1135000, rata-rata peningkatan sebesar 12,25% per tahun. Upah minimum kota Dumai pada tahun 2006 sebesar Rp 785650, pada tahun 2011 sebesar Rp 1177000, rata-rata peningkatan sebesar 8,42% per tahun.

Tabel 5. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota tahun 2006-2011 (%)

No	Kabupaten /Kota	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuantan Singingi	8,83	8,91	8,26	6,90	7,03	7,32
2	Indragiri Hulu	7,41	7,36	7,53	6,99	7,01	7,21
3	Indragiri Hilir	7,94	7,82	7,95	7,14	7,31	7,38
4	Pelalawan	7,66	7,20	7,14	7,02	7,17	7,05
5	Siak	7,82	7,85	7,61	7,15	7,36	7,46
6	Kampar	7,71	7,99	7,97	6,86	7,05	7,04
7	Rokan Hulu	7,23	7,11	7,08	5,77	7,29	7,60
8	Bengkalis	7,69	7,87	7,60	7,09	7,14	7,66
9	Rokan Hilir	8,07	7,95	7,88	7,26	7,57	7,68
10	Kepulauan Meranti	-	7,57	7,34	6,59	7,45	8,45
11	Pekanbaru	10,15	9,89	9,05	8,81	8,98	9,56
12	Dumai	9,34	8,87	8,66	8,41	8,60	8,34
13	Riau	8,66	8,25	8,06	6,56	7,16	7,63

Sumber : BPS Provinsi Riau

Pada tabel 5 tersebut dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di provinsi Riau selama periode tahun 2006-2011 relatif menurun. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,66% dan pada tahun 2011 sebesar 7,36%. Laju pertumbuhan ekonomi

daerah tingkat II di provinsi Riau selama periode tahun 2006-2011 juga relative menurun. Pada tahun 2006 daerah tingkat II yang mencapai laju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau adalah kabupaten Kuantan Singingi (8,83%), kota Pekanbaru (10,15%) dan kota Dumai (9,34%). Pada tahun 2011 daerah tingkat II yang mencapai laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau adalah kabupaten Bengkalis (7,66%), kabupaten Rokan Hilir (7,68%), kabupaten Kepulauan Meranti (8,45%), kota Pekanbaru (9,56%) dan kota Dumai (8,34%).

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di provinsi Riau menurut daerah tingkat II kabupaten/kota tahun 2006-2011 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 6 : Hasil regresi linear berganda dengan IPM sebagai dependent variable dan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi sebagai independent variabel

Keterangan	Koefisien Regresi	Standar Error	t statistic	Sign t
Constant	63,463	1,947	32,600	0,000
Tingkat kemiskinan	-0,163	0,022	-7,452	0,000
Tingkat pengangguran terbuka	-0,084	0,042	-1,985	0,024
Upah minimum	0,005	0,001	6,028	0,000
Laju pertumbuhan ekonomi	0,953	0,200	4,764	0,000
F statistic	46,979			
R. Square	0,749			
Adjusted R. Square	0,733			

Berdasarkan hasil regresi tersebut persamaan linear berganda yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 63,463 - 0,163 x_1 - 0,084 x_2 + 0,005 x_3 + 0,953 x_4$$

Y = Nilai IPM

x1= tingkat kemiskinan (%)

x2= tingkat pengangguran terbuka (%)

x3= upah minimum kabupaten/kota (Rp 000)

x4= laju pertumbuhan ekonomi (%)

Berdasarkan angka t statistic untuk variable tingkat kemiskinan sebesar -7,452 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$, berarti tingkat kemiskinan berpengaruh sangat nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan level of significance (α) 0,01. Nilai t statistic untuk variable tingkat pengangguran -1,985 dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$, berarti tingkat pengangguran berpengaruh nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan level of significance (α) 0,05. Nilai t statistic untuk variable upah minimum kabupaten/kota 6,028 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$, berarti upah minimum kabupaten/kota berpengaruh sangat nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan level of significance (α) 0,01. Nilai t statistic untuk variable laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) 4,764 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$, berarti laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh sangat nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan level of significance (α) 0,01.

Berdasarkan F statistic 46,979 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$ berarti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh sangat nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Koefisien determinasi (R^2) bernilai 0,749 berarti variasi perubahan pada variable tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi 74,90% mempengaruhi perubahan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dan 25,10% dipengaruhi oleh variable lain. Nilai konstanta pada persamaan regresi tersebut sebesar 63,463 menunjukkan jika tidak ada pengaruh variable tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi maka nilai IPM adalah sebesar 63,463. Koefisien regresi variable tingkat kemiskinan sebesar -0,163 menunjukkan pengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat kemiskinan 1%, maka IPM di daerah tingkat II kabupaten/kota akan turun sebesar 0,163 poin dengan asumsi variable lainnya konstan.

Koefisien regresi variable tingkat pengangguran sebesar -0,084 menunjukkan pengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat pengangguran 1%, maka IPM di daerah tingkat II kabupaten/kota akan turun sebesar 0,084 poin dengan asumsi variable lainnya konstan. Koefisien regresi variable upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,005 menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti setiap kenaikan upah minimum kabupaten/kota Rp 1000, maka IPM akan meningkat sebesar 0,005 poin dengan asumsi variable lainnya konstan. Koefisien regresi variable laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,953 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota sebesar 1%, maka IPM akan meningkat sebesar 0,953 poin dengan asumsi variable lainnya konstan.

KESIMPULAN

- a. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Riau.
- b. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) masing-masing sebesar -0,163 dan - 0,084
- c. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), masing-masing sebesar 0,005 dan 0,953.
- d. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) adalah laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, usaha- usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan agar nilai indeks pembangunan manusia (IPM) terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunur Rofiq. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Kebijakan dan tantangan masa depan. Penerbit Republika. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006. Jakarta- Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2009. Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008. Jakarta- Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta- Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Pengangguran 2001-2006. Jakarta-Indonesia Badan Pusat Statistik. 2009. Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan: Jakarta. Indonesia
- BAPPEDA Provinsi Riau 2010. Profil Daerah Provinsi Riau Tahun 2010. Pekanbaru
- BAPPEDA Provinsi Riau 2011. Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan. Pekanbaru, Riau

BAPPEDA Provinsi Riau 2011.INFO – EKS (Informasi Eksekutif). Pekanbaru, Riau
BAPPEDA Provinsi Riau 2011.Data annual Provinsi Riau 2011. Pekanbaru, Riau
BPS.Provinsi Riau 2013. Pendapatan Regional Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau menurut lapangan usaha 2008-2012.Pekanbaru. Riau
BPS. Provinsi Riau 2012. Riau dalam angka 2012.Pekanbaru. Riau BPS. Provinsi Riau 2013. Riau dalam angka 2013.Pekanbaru. Riau.